

Studi Gender: Partisipasi Publik dan Penguatan Individu Rumah Tangga

Eni Ria Yusriani^{1*}, Selamah Rabia Qistina²

¹Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, ²Universiti Utara Malaysia

Abstract: The conservative paradigm prevalent in society perceives the role of women as suboptimal both in domestic life and in the public sphere. Therefore, this research aims to thoroughly examine the contributions of women in household and societal contexts. The research is conducted in the form of a literature review. Data is gathered from 40 research journals using keywords such as gender, public policy, household, and Islamic values. The data is then processed using data reduction to generate a comparative analytical model. The research findings indicate that the contributions of women in domestic life can be observed through the formation of character values in children. Character values are categorized into terminal and instrumental values. On the other hand, in the public sphere, when facilitated by the government or supported by the family, women are able to contribute to economic strengthening and other social movements. The indication towards these categories of women's values is based on Islamic ethics, which states that women have equal value and position as men. The findings also determine the "oughtness" or obligation from both categories of values. The research results show that generally, both adolescents and parents exhibit good instrumental and terminal values.

Article History

Received: 12 November 2022

Revised: 30 November 2023

Published: 31 Desember 2023

Key Words:

*Gender,
Public Participation,
Individual Development,
Household*

Copyright

© Saree, Eni Ria Yusriani et al

This is an open-access
article under
the [CC-BY-SA License](#).



 <https://doi.org/10.47766/saree.v5i2.917>

 Corresponding Author: eniyusriani90@gmail.com

Abstrak: Paradigma konservatif yang berkembang di masyarakat menganggap peran perempuan kurang optimal baik di dalam kehidupan rumah tangga maupun ranah publik. Oleh sebab itu penelitian bertujuan mengkaji secara mendalam kontribusi perempuan di dalam rumah tangga dan masyarakat. Penelitian berjenis studi pustaka. Data diambil dari 40 jurnal penelitian menggunakan kata kunci gender, kebijakan publik, rumah tangga, dan nilai Kelslaman. Data kemudian diolah menggunakan reduksi data sehingga mampu menghasilkan konstruk model yang dianalisis secara komparatif. Hasil penelitian menunjukkan kontribusi perempuan di dalam kehidupan rumah tangga dapat diamati melalui pembentukan nilai-nilai karakter anak. Nilai karakter dikategorikan menjadi nilai terminal dan instrumental. Sedangkan di dalam ranah publik apabila difasilitasi oleh pemerintah maupun dukungan keluarga perempuan mampu berkontribusi dalam hal penguatan ekonomi dan gerakan sosial lainnya. Indikasi terhadap kategori nilai perempuan ini didasarkan dengan etika Islam bahwa peran dan kedudukan wanita dengan laki-laki sama secara nilai. Hasil juga menentukan 'oughtness' atau 'kewajiban' dari kedua kategori nilai tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, baik remaja maupun orang tua memiliki nilai instrumental dan terminal yang baik.

Kata Kunci:

Gender,
Partisipasi Publik,
Penguatan Individu,
Rumah Tangga.

PENDAHULUAN

Status dan peranan perempuan dalam masyarakat masih bersifat subordinatif dan belum sebagai mitra sejajar dengan laki-laki yang tercermin pada sedikitnya jumlah perempuan yang menempati posisi penting di pemerintahan, lembaga legislatif dan yudikatif, serta kemasyarakatan (Núñez et al., 2020; Park, 2021).

Walaupun Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk melakukan pengarusutamaan isu gender dan isu pendidikan, namun upaya yang berjalan masih dilakukan secara terpisah dan entitas yang bertanggung jawab atas isu-isu ini masih belum berkolaborasi satu sama lain (Rahma, 2023). Mengarusutamakan perspektif gender dalam kebijakan pendidikan akan meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan dan membawa dampak positif bagi warga yang terkena dampak atau berpotensi terkena

dampak pendidikan, termasuk perempuan dan kelompok rentan (Marson & McKinney, 2019).

Aspek tersebut menjadi salah satu bahasan pada konferensi gender dunia. Hasil konferensi di atas telah membuahkan perubahan konsep yang sangat mendasar yaitu pembahasan dari masalah fisik biologis (biological sphere) ke masalah sosial budaya (social-cultural sphere) (Martin et al., 2012). Begitu pula dengan Indonesia yang menindaklanjuti hasil pembahasan tersebut dengan melaksanakan pembangunan pemberdayaan perempuan melalui pendekatan kesetaraan dan keadilan gender (KKG) terintegrasi dalam sistem pembangunan nasional (Gómez-Ortiz et al., 2016; Scambor et al., 2014).

Dalam konteks kearifan lokal masih berkembang paradigma konservatif yang memandang sebelah mata peran perempuan (Aryani, 2021). Pada kasus yang lebih spesifik, khususnya di daerah pedesaan, paradigma masyarakat masih mendeskreditkan perempuan. Ketimpangan peran muncul akibat berkembangnya pandangan konservatif bahwa perempuan cukup menjadi Ibu Rumah Tangga yang bekerja di dapur (Khoifin et al., 2023; Purwa & Setiawan, 2021).

Di Indonesia, peran perempuan sering disebut sebagai istri, ibu, dan ibu rumah tangga, bukan sebagai posisi karir. Oleh karena itu, partisipasi perempuan di ruang dewan direksi masih rendah. Keberagaman gender dalam dewan direksi menunjukkan keuntungan seperti memberikan kualitas pelaporan keuangan yang baik. Oleh karena itu, penelitian ini menguji konservatisme akuntansi sebagai kualitas pelaporan keuangan yang baik dan mengeksplorasi hubungan antara partisipasi perempuan, kontrol spesifik perusahaan, dan konservatisme akuntansi di perusahaan manufaktur Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa perusahaan manufaktur Indonesia tidak konservatif dalam pelaporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mempekerjakan lebih banyak perempuan di ruang rapat dapat meningkatkan konservatisme akuntansi. Oleh karena itu, membentuk kembali kuota gender - untuk memasukkan lebih banyak perempuan di ruang rapat harus diberlakukan. Hasil penelitian ini juga menyoroti bahwa dengan tidak adanya prinsip konservatisme, pengungkapan risiko dapat menjadi pengganti konservatisme, terutama dalam kasus laba perusahaan yang lebih tinggi.

Fenomena tersebut sangat bertolak belakang dengan program strategis nasional yang mengarah kepada peningkatan kualitas pemuda, baik dari sisi pendidikan, keterampilan, maupun karakter, harus menjadi prioritas. keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan, baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat sangat tergantung dari peran serta seluruh penduduk, baik laki-laki maupun perempuan sebagai pelaku, dan sekaligus pemanfaat hasil pembangunan (MacGregor, 2017; Miftah & Choir, 2023).

Tuntutan akan kualitas sumber daya manusia perempuan memiliki dampak pada dua hal, yakni: pertama, dengan kualitas yang dimiliki, perempuan akan menjadi mitra kerja aktif laki-laki dalam mengatasi masalah-masalah sosial, ekonomi dan politik yang diarahkan pada pemerataan pembangunan. Kedua, perempuan yang berkualitas turut mempengaruhi kualitas generasi penerus, mengingat fungsi reproduksi perempuan berperan dalam mengembangkan sumber daya manusia di masa datang (Chen et al., 2022; Lodge & Lynch, 2014).

Sebenarnya, pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan (Kurzman et al., 2019; Lockley et al., 2019). Demikian pula pembaruan lembaga-lembaga sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya merupakan unsur yang sangat penting (Postiglione, 2015). Dengan dasar pemikiran ini, maka pemberdayaan ekonomi kerakyatan amat erat kaitannya dengan pemantapan kekuatan ekonomi, pembudayaan nilai-nilai budaya modern, dan pengamalan demokrasi ekonomi (Núñez et al., 2020).

Adapun letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini lebih menyoroti pada fenomena terhadap kesenjangan peran wanita dalam lingkup masyarakat. Oleh sebab itu diperlukan konstruk paradigma individu dan peran kolaboratif pemerintah sebagai pengampu kebijakan public. Pada aspek individu, penguatan dan peningkatan kapasitas perempuan menjadi salah satu factor determinan peningkatan peran dan fungsi perempuan itu sendiri.

Melalui peningkatan kompetensi, wanita dalam hal ini Ibu Rumah Tangga mampu tampil dan menemukan eksistensi peran di tengah masyarakat maupun rumah tangga secara mikro. Para Ibu Rumah Tangga mampu mandiri melalui keikutsertaan dalam pemberdayaan serta keberlanjutan pembinaan dalam pengembangan usahanya.

METODE PENELITIAN

Model pendekatan dalam penelitian ini lebih banyak menggunakan pendekatan kualitatif agar diperoleh gambaran mendalam tentang faktor-faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan pelaku usaha (anggota kelompok) dalam meningkatkan pendapatannya, mengetahui bagaimana pola-pola pengembalian angsuran kredit sebagai kewajiban para anggota serta hasil yang diperoleh setelah mengikuti program pemberian bantuan modal oleh pemerintah maupun lembaga perbankan, sedangkan metode penelitiannya lebih banyak menggunakan metode analisis-deskriptif.

Untuk jenis atau model penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu prosedur atau cara untuk memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan objek yang diteliti (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) sebagaimana adanya, berdasarkan fakta-fakta faktual pada saat sekarang.

PEMBAHASAN

Konseptualisasi Partisipasi

Dalam kerangka yang berbeda, Antoft dan Novack (1998) mengungkapkan bentuk partisipasi yang bisa dilakukan oleh komunitas perempuan untuk memperjuangkan kepentingan dan kebutuhan keluarganya. Dalam konteks kebijakan publik peran perempuan berlangsung secara simultan baik secara personal maupun melalui pemerintah sebagai pengampu kebijakan.

Pemerintah selayaknya memberikan kesempatan bagi penduduk ataupun kelompok masyarakat menikmati akses partisipasi lebih besar karena tidak semua kelompok masyarakat pada waktu yang bersamaan, di tempat yang sama, dengan kepentingan yang sama dapat berpartisipasi secara langsung dan bersama-sama. Apabila dianalisis, kebijakan publik yang dilaksanakan pemerintah dapat berjalan efektif apabila memperhatikan factor intensitas target dalam waktu, tenaga, dan sumber daya lain. Secara

teoretis, pemerintah mampu berpartisipasi melalui kebijakan public dalam bentuk *electoral participation*, *lobbying*, *getting on council agenda*, *special purpose 'bodies'*, dan *special purpose participation*.

Identifikasi Faktor Penyebab Kesenjangan

Sebuah refleksi ibu rumah tangga dalam budaya, negara dan status ekonomi perempuan oleh Kristiansen dan McGowan bahwa dalam studi feminis, status sosial ekonomi dipelajari dalam rangka melihat bagaimana perempuan diposisikan dalam masyarakat *vis a vis* laki-laki dan bagaimana pemosisian tersebut menimbulkan ketimpangan gender (Kristiansen et al., 2015; McGowan, 2005). Ketimpangan gender merupakan salah satu konsep kunci yang digunakan untuk memahami status sosial ekonomi perempuan, yaitu melalui penjelasan mengapa dan bagaimana laki-laki menguasai sumber-sumber ekonomi dan sosial yang lebih besar daripada perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep ini berakar pada teori feminisme yang berkembang di Barat yang secara umum berargumen bahwa perempuan cenderung menjadi kelompok yang tertindas dalam proses pembagian sumber-sumber ekonomi dan social (Oerton, 2013).

Di arena rumah tangga, ibu rumah tangga lebih merupakan konsep berbasis ideal, yaitu terkait dengan citra dan identitas seorang istri. Sebaliknya, di arena pasar tenaga kerja, ibu rumah tangga lebih dipahami sebagai konsep berbasis material, terkait dengan jenis pekerjaan yang dianggap tidak produktif sehingga mengantarkan perempuan ke dalam proses segregasi, domestifikasi, dan feminimisasi kemiskinan. Semuanya itu pada akhirnya berimplikasi pada rendahnya status sosial ekonomi perempuan *vis a vis* laki-laki dalam kehidupan masyarakat. Kendati demikian, pada kenyataannya citra ideal ini tidak lebih dari sebuah kemasan karena peran perempuan di sektor publik cenderung dianggap sebagai hal yang sekunder (Park, 2021).

Berkaitan dengan konsep pemberdayaan wanita sebagai mitra sejajar pria, dikemukakan oleh Onny S. Prijono bahwa pemberdayaan ekonomi oleh wanita dapat dicapai melalui pendidikan, begitupula sebaliknya, melalui peningkatan ekonomi akan tercapai tingkat pendidikannya, demikian halnya dengan akses dan pengendalian atas pendapatan bagi wanita merupakan hal penting karena menyangkut otonominya (Rahma, 2023).

Kependudukan dan Kemiskinan

Secara umum, masalah kependudukan sangat erat kaitannya dengan masalah ekonomi. Berbagai problematika gender juga disebabkan factor ekonomi. Pada kasus ini seharusnya pemerintah mampu berkontribusi dalam tataran kebijakan.

Bias jender atau ketidakadilan gender akibat kurangnya prioritas fungsi dan peranan wanita dalam pelaksanaan pemberdayaan. Perempuan tidak mampu mandiri sehingga bergantung sepenuhnya kepada pemasukan suami. Padahal, lapangan usaha mandiri sangat terbuka seiring masifnya social media. Para perempuan tidak hanya sekedar menjadi Ibu Rumah Tangga tetapi juga mampu berwirausaha. Kreativitas dan strategi pemasaran menjadi kunci untuk berwirausaha. Sayangnya, mayoritas perempuan terhegemoni oleh paradigma konservatif sehingga prospek wirausaha tidak berjalan lancar. Untuk itu, perlu dukungan kebijakan public yang memfasilitasi perempuan agar berani berwirausaha. kinerja kelompok perempuan sebagai tujuan pemberdayaan ekonomi keluarga miskin melalui peningkatan usaha ekonomi produktif.

Bias Gender

Keterbatasan akses juga diakibatkan oleh masalah bias gender, peran perempuan sebagai isteri dan ibu rumah tangga belum mendapat legitimasi sepenuhnya dari instuisi sosial-budaya masyarakat setempat, sehingga akses untuk memperoleh pengetahuan dan informasi (teknologi) menjadi semakin terbatas.

Sebagai akibat adanya perbedaan gender ini, maka akan melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Munculnya kesenjangan (ketidakadilan) secara sistematis dan terstruktur. Kondisi dimana kaum pria dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut yang termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan. Marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotipe atau melalui pelabelan negatif, kekerasan (*violence*), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*burden*), serta sosialisasi ideologi nilai peran gender.

Dalam kehidupan rumah tanggapun telah terjadi marginalisasi terhadap kaum perempuan bahkan dalam masyarakat atau kultur dan negara, dalam bentuk diskriminasi laki-laki dan perempuan, marginalisasi

juga diperkuat oleh adat istiadat maupun tafsir keagamaan. Sebagian besar pemahaman dan pandangan masyarakat tentang perbedaan status sosial-ekonomi dalam keluarga antara peran ibu rumah tangga (perempuan) dengan peran kepala rumah tangga (laki-laki) telah melahirkan persepsi dan penilaian yang salah sehingga pada akhirnya mewujudkan ketidakadilan gender.

Perempuan dan Latar Belakang Pendidikan

Pendidikan membentuk karakter dan mengkonstruksi paradigma. Latar belakang pendidikan juga berpengaruh terhadap kesiapan perempuan untuk mengambil perannya sebagai ibu rumah tangga atau masyarakat. Kondisi dilematis dihadapi perempuan diantaranya rendahnya latar belakang pendidikan. Perempuan dituntut mengambil peran ganda tanpa imbalan setimpal. Tingginya angka pernikahan muda menjadi salah satu problema yang dihadapi perempuan. Perempuan yang seharusnya dalam usia produktif meningkatkan kompetensi melalui mimbar akademik dipaksa menjadi korban keadaan. Akibatnya, rendahnya kompetensi, minimnya formalisasi gelar pendidikan menghadirkan berbagai kasus sosial hingga kepada kekerasan di dalam rumah tangga.

Fenomena ini seharusnya dapat diantisipasi pemerintah melalui kebijakan beasiswa prioritas bagi perempuan dengan latar belakang sosial, ekonomi, dan keluarga yang problematis. Adanya kebijakan beasiswa prioritas membawa perubahan bagi perempuan, meningkatnya jenjang pendidikan membuka peluang untuk ikut berkompetisi di dunia usaha.

Selaras dengan kebijakan publik yang ditetapkan pemerintah yaitu belum tersedianya memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi dan/atau dari keluarga yang tidak mampu, dengan mempertimbangkan peserta didik perempuan secara proporsional.

Selain itu, pendidikan tidak hanya bersifat formal melainkan informal dan non formal. Dalam hal ini pemerintah dapat berperan dalam menyusun kurikulum yang berbasis kompetensi dasar, sesuai dengan kebutuhan dan potensi pembangunan daerah, mampu meningkatkan kreativitas guru, inklusif dan tidak bias gender, sesuai dengan kapasitas peserta didik, menunjang peningkatan penguasaan ilmu-ilmu dasar serta keimanan, ketakwaan dan kepribadian yang berakhlak mulia.

Kondisi Rumah Tangga

Perempuan dianggap kaum marginal dengan alasan hanya mampu berperan di dalam kehidupan rumah tangga, padahal tanpa adanya seorang Ibu maka karakter anak tidak akan mampu terbentuk dengan baik. Selain itu fenomena terhadap perempuan adalah anggapan perempuan tidak mampu berperan di ranah publik.

Namun, terdapat perbedaan dalam nilai terminal remaja dan orang tua di lintas kelompok etnis. Analisis juga menunjukkan bahwa remaja memiliki nilai terminal dan instrumental yang mirip dengan orang tua mereka, yang menunjukkan bahwa orang tua memiliki pengaruh signifikan dalam pembentukan nilai anak mereka. Dengan demikian, orang tua memainkan peran penting dalam mentransmisikan nilai-nilai yang baik kepada anak mereka dalam menahan pengaruh negatif.

Pandangan yang mereduksi perempuan hanya sebagai pengisi ruang domestik dan menganggap mereka sebagai kaum marginal telah menjadi suatu pandangan yang usang. Di era modern ini, perempuan telah membuktikan bahwa mereka memiliki kompetensi yang setara dengan laki-laki. Dalam banyak kasus, perempuan telah berhasil mencapai posisi penting dan mempengaruhi kebijakan di berbagai sektor, termasuk politik, bisnis, pendidikan, dan lainnya. Perempuan juga telah menunjukkan kapasitas mereka sebagai agen perubahan dalam masyarakat melalui berbagai inisiatif dan gerakan yang membawa perubahan positif.

Selain itu, peran Ibu dalam pembentukan karakter anak sangat penting dan tidak hanya terbatas pada ruang domestik. Seorang Ibu juga dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi anak-anaknya dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk berperan dalam ranah publik. Prinsip kesetaraan gender menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam semua aspek kehidupan. Ini termasuk hak untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam ranah publik.

Akhirnya, sejarah dan realitas saat ini telah membuktikan bahwa perempuan mampu berperan secara signifikan di ranah publik. Dari pemimpin negara, CEO perusahaan besar, hingga ilmuwan perempuan telah membuktikan bahwa gender bukanlah penghalang untuk berkontribusi di ranah publik. Oleh karena itu, perlu ada perubahan paradigma dan pemahaman bahwa perempuan bukanlah kaum marginal, melainkan bagian

penting dari masyarakat yang memiliki potensi dan kapabilitas yang sama dengan laki-laki.

Strategic Management dan Penguatan Peran Pemerintah

Lahirnya sebuah kebijakan memerlukan beberapa hal untuk diperhatikan. Pertama, kebijakan dan strategi tersebut bersifat terencana (by design) yang tidak lahir dan berkembang dari kehendak sosiologis, ekonomis, maupun politis yang sifatnya ad hoc, tidak terencana. Kedua, kebijakan dan strategi tersebut tidak semata-mata untuk mengendalikan tingkat pertumbuhan penduduk, tetapi lebih pada menciptakan masyarakat Indonesia yang bertanggung jawab dengan paradigma hidup sehat menuju SDM yang berkualitas. Pembatasan-pembatasan ini berakar pada pandangan tentang posisi perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Kaum perempuan dan laki-laki dianggap memiliki posisi yang berbeda satu sama lainnya. Atas dasar itu, hak-hak dan tanggung jawab merekapun dianggap berbeda.

Jenjang dan anak tangga pemberdayaan tersebut tidak mesti harus diperlakukan sebagai caraprescriptive dalam meningkatkan derajat pemberdayaan publik. Pada tataran praktis, kebijakan public pemerintah dapat dilaksanakan secara bertahap dan dilampaui satu persatu sesuai dengan kondisi dan fakta di lapangan. Proses tahapan pelaksanaan kebijakan public seperti memfasilitasi dalam pendidikan dan pelatihan mengarah kepada kebijakan public terkontrol dan ototom (interdependent control).

Secara operasional, kondisi daerah tidaklah sama. Sebagai contoh, kondisi masyarakat dan pedesaan. Oleh sebab itu, kebijakan public yang diterapkan terkait kesetaraan gender harus dilaksanakan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Lompatan kebijakan pada tataran praktis dapat dilakukan sepanjang kebijakan tersebut terukur dan didukung oleh kesiapan institusi. Departementalisasi pemerintahan seperti Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi, Komnas Perempuan dan lainnya seyogyanya berupaya mencapai jenjang yang tertinggi untuk meningkatkan keberdayaan dan keterlibatan publik dalam pemerintahan daerah.

Dengan menimbang perbandingan bobot urgensi kebijakan yang terkandung dalam suatu kebijakan atau program, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada pengakuan yang nyata bahwa stakeholder utama dalam pemerintahan daerah adalah masyarakat. Mengharapkan masyarakat secara

otomatis berpartisipasi jelas merupakan kesalahan besar karena partisipasi publik memang tidak secara alamiah datang dengan sendirinya dalam urusan pemerintah. Sementara itu, mengharapkan birokrasi pemerintah daerah secara sukarela meningkatkan partisipasi publik juga tidak mungkin karena pada hakikatnya ada perbedaan besar antara birokrasi dengan partisipasi.

Kebijakan pemerintah daerah yang sesuai dengan model pemerintahan yang berorientasi pada masyarakat dalam pelayanan publik adalah melakukan upaya desentralisasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat dan berubah. Untuk itu, diperlukan suatu model baru yang mampu beradaptasi dan merespon tuntutan perubahan secara cepat serta mampu menyelesaikan berbagai persoalan kebutuhan masyarakat.

Di antara model partisipasi-alternatif yang ada, maka model Community-Oriented Enabler merupakan model yang paling sesuai bagi pemerintah daerah yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Alternatif pilihan organisasi internal pemerintah daerah yang cocok dalam model ini antara lain manajemen matriks, desentralisasi, departementasi berbasis wilayah (bukan berbasis profesi), dan kerjasama antar profesi. Diperlukan adanya strategic center yang kecil tapi berpengaruh. Seperti halnya dalam market-oriented enabler, dibutuhkan pula political executive yang kuat namun lebih memberikan ruang yang lebih besar bagi demokrasi partisipatif.

Strategi utama model ini adalah mengenali semua kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Pemerintah daerah tidak secara langsung memenuhi seluruh kebutuhan tersebut, kecuali dalam lingkup strategic management lalu aspek operasionalisasinya diserahkan kepada masyarakat. Masyarakat berpartisipasi dalam lingkup pengambilan keputusan, pelaksanaan keputusan, local advocacy. Maksudnya adalah agar penyediaan layanan publik mengikuti kebutuhan dan preferensi masyarakat dengan membiarkan mereka menjalankan peran aktif semaksimal mungkin dalam penyediaan layanan publik. Yang dimaksud sebagai local community dalam penyediaan layanan publik ini tidak semata-mata penduduk lokal tetapi juga meliputi agen-agen lokal seperti sektor swasta, organisasi nirlaba, sektor publik lainnya dan yang sejenisnya⁵⁰.

Partisipasi Publik

Partisipasi publik seyogyanya tidak dilihat hanya dalam sekali atau serangkaian kejadian, tetapi dilihat dalam penentuan berbagai hal penting secara bersama-sama antara politisi, administrator, kelompok kepentingan, dan warga (Graham & Philips, 1998)⁴⁴. Pada dasarnya tujuan partisipasi publik sangatlah beragam, yakni meliputi : berbagi informasi, akuntabilitas, legitimasi, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan berbagi kekuasaan secara nyata.

Selanjutnya Graham dan Philips (1998) dari beberapa studi partisipasi publik dalam local governance yang dilakukannya, menyebutkan bahwa karakteristik dasar dari partisipasi publik meliputi : partisipasi publik melibatkan warga dalam keseluruhan proses pemilihan daerah/kota; pada tingkatan minimum, partisipasi publik melibatkan interaksi dan komunikasi dua arah yang diikuti dengan potensi untuk mempengaruhi keputusan kebijakan dan outcomenya; partisipasi publik melibatkan individu dan kelompok, baik yang bersifat ad hoc maupun stakeholder permanen; partisipasi publik lebih berupa seni ketimbang ilmu karena ia berpijak pada dua realitas, yakni realitas publik (terjadi dalam lingkungan politik) dan realitas birokrasi (berada dalam konteks antar pemerintahan).

Oleh karenanya, masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan.

Selanjutnya, proses mewujudkan partisipasi publik dalam pemerintahan daerah bukanlah hal yang mudah karena masyarakat belum terbiasa dengan partisipasi aktif dan sukarela, atau mereka masih terbiasa dengan mobilized participation. Upaya pemberdayaan merupakan hal krusial yang harus dilakukan. Tuntutan terhadap local authorities harus membuka diri disertai dengan penguatan local interest groups, Pendekatan struktural dan kultural harus dilakukan dalam hal ini.

Pemberdayaan masyarakat dengan mengajukan jenjang pemberdayaan warga. Jenjang tersebut dimulai dari non-partisipasi warga, lalu ditingkatkan menjadi partisipasi warga, dan terakhir sampai pada kontrol oleh warga (citizen control). Jenjang non- partisipasi terlihat dari bentuk layanan

pemerintah daerah kepada warga yang dimulai dari anak tangga : civic hype, clynical consultation, poor information, sampai customer care.

Keterlibatan warga lebih tinggi lagi ada pada jenjang partisipasi warga yang dimulai dari anak tangga pelayanannya, berupa *high quality information, genuine consultation effective advisory board, limited decentralised decision-making partnership*, sampai yang tertinggi adalah *delegated control*. Tingkat pemberdayaan warga yang tertinggi justru terletak pada jenjang kontrol oleh warga, yang dimulai dari anak tangga entrusted control sampai puncaknya yaitu control individu.

Tiga jenjang pemberdayaan warga beserta anak tangganya tersebut dimaksudkan untuk memperjelas saja kondisi yang dimungkinkan. Bisa jadi, kondisi sebenarnya bisa lebih sederhana ataupun lebih rumit dari kerangka tersebut. Selain itu, realitas yang kompleks dari partisipasi warga bisa bervariasi antara institusi publik yang satu dengan yang lainnya sesuai dengan tuntutan situasi dan kebutuhan yang actual (Burns & Hayes, 2012).

Penguatan Individu Perempuan di dalam Masyarakat dan Rumah Tangga

Studi tentang analisa peran perempuan dalam keluarga memperkuat pentingnya peran perempuan dalam pemberdayaan ekonomi keluarga. Analisis teoritis tentang pelaksanaan suatu kebijakan program penanggulangan dan pengentasan kemiskinan masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan yang dikhususkan kepada individu/perorangan, kelompok maupun keluarga-keluarga miskin/kurang mampu ataupun pelaku usaha ekonomi lemah agar memiliki kemampuan usaha ekonomi produktif baik secara kelembagaan, kebijakan maupun melalui peran pendampingan dan pembinaan petugas pendamping, yang kesemuanya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha ekonomi produktif oleh individu/perorangan maupun kelompok-kelompok usaha.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam pembentukan nilai-nilai karakter anak, yang dikategorikan menjadi nilai terminal dan instrumental. Selain itu, perempuan juga terbukti mampu berkontribusi signifikan dalam ranah publik, terutama dalam penguatan ekonomi dan gerakan sosial, apabila mendapatkan fasilitasi yang memadai dari pemerintah dan dukungan keluarga. Hal ini menunjukkan

bahwa perempuan memiliki potensi yang sama dengan laki-laki untuk berperan aktif dan berkontribusi dalam masyarakat. Penelitian ini juga menggarisbawahi bahwa berdasarkan etika Islam, peran dan kedudukan wanita dan laki-laki adalah sama secara nilai. Kedua kategori nilai tersebut, yakni nilai terminal dan instrumental, memiliki 'oughtness' atau 'kewajiban' yang sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, baik remaja maupun orang tua memiliki nilai instrumental dan terminal yang baik. Oleh karena itu, perlu ada perubahan paradigma dan pemahaman tentang peran dan kontribusi perempuan dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryani, L. A. and M. K. S. B. (2021). Gender Empowerment In The Framework Of Local Wisdom. *JOURNAL SCIENTIFIC OF MANDALIKA (JSM)* e-ISSN 2745-5955 | p-ISSN 2809-0543, 2(6), 248–259. <https://doi.org/10.36312/10.36312/vol2iss6pp248-259>
- Burns, J. A., & Hayes, T. J. (2012). *New Strategies in Higher Education Marketing*. Routledge.
- Chen, B., Wang, X., & Gao, Y. (2022). Does Friend Support Matter? The Association between Gender Role Attitudes and School Bullying among Male Adolescents in China. *Children*, 9(8), 1139. <https://doi.org/10.3390/children9081139>
- Gómez-Ortiz, O., Romera, E. M., & Ortega-Ruiz, R. (2016). Parenting Styles and Bullying. The Mediating Role of Parental Psychological Aggression and Physical Punishment. *Child Abuse & Neglect*, 51, 132–143. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2015.10.025>
- Khoifin, K., Marzuki, M. M., & Jongsureyapart, C. (2023). Reshaping Gender Quotas In The Boardroom: Women's Participation And Accounting Conservatism in Indonesia. *International Journal of Managerial and Financial Accounting*, 15(1), 1. <https://doi.org/10.1504/IJMFA.2023.127525>
- Kristiansen, T. M., Antoft, R., Primdahl, J., & Petersen, K. H. (2015). The Significance of Everyday Life—An Ethnographic Study of Participation in Group-Based Patient Education. *Advances in Applied Sociology*, 05(02), 81–93. <https://doi.org/10.4236/aasoci.2015.52007>
- Kurzman, C., Dong, W., Gorman, B., Hwang, K., Ryberg, R., & Zaidi, B. (2019). Women's Assessments of Gender Equality. *Socius: Sociological Research for a Dynamic World*, 5, 237802311987238. <https://doi.org/10.1177/2378023119872387>
- Lockley, A., Marcoes, L., Nugroho, K., & Gina, A. (2019). Aksi Kolektif Perempuan untuk Pemberdayaan di Indonesia. *Jurnal Perempuan*, 24(1), 13–26.
- Lodge, A., & Lynch, K. (2014). *Equality and Power in Schools*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203018620>
- MacGregor, S. (2017). *Routledge Handbook of Gender and Environment*. Taylor & Francis.
- Marson, S. M., & McKinney, R. E. (Eds.). (2019). *The Routledge Handbook of Social Work Ethics and Values*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429438813>
- Martin, A. J., Nejad, H., Colmar, S., & Liem, G. A. D. (2012). Adaptability: Conceptual and Empirical Perspectives on Responses to Change, Novelty and Uncertainty. *Australian Journal of Guidance and Counselling*, 22(1), 58–

81. <https://doi.org/10.1017/jgc.2012.8>
McGowan, R. (2005). *Gender and Diversity in Organizations Genre et Diversite*.
Miftah, M., & Choir, A. (2023). Public Space, Technology, and Humanity in
Inclusion Education Policy Dynamics in Indonesia. *QALAMUNA: Jurnal
Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 15(1), 473–482.
<https://doi.org/https://doi.org/10.37680/qalamuna.v15i1.2489>
Núñez, R. B. C., Bandeira, P., & Santero-Sánchez, R. (2020). Social Economy,
Gender Equality at Work and the 2030 Agenda: Theory and Evidence
from Spain. *Sustainability*, 12(12), 5192.
<https://doi.org/10.3390/su12125192>
Oerton, S. (2013). *Beyond Hierarchy: Gender And Sexuality In The Social Economy*
(Vol. 4). Taylor & Francis.
Park, S. (2021). Gender and Performance in Public Organizations: a Research
Synthesis and Research Agenda. *Public Management Review*, 23(6), 929–
948. <https://doi.org/10.1080/14719037.2020.1730940>
Postiglione, G. A. (2015). *Education and Social Change in China: Inequality in a
Market Economy*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315704937>
Purwa, P. A. L., & Setiawan, D. (2021). Gender and Conservatism: a Cross-
Countries Study. *PSU Research Review*, 5(2), 182–194.
<https://doi.org/10.1108/PRR-08-2019-0028>
Rahma, H. (2023). *The Implications Of Patriarchal Culture Toward Gender
Discrimination Behavior In Anne With An E Movie Series*. Fakultas Adab
dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/74478>
Scambor, E., Bergmann, N., Wojnicka, K., Belghiti-Mahut, S., Hearn, J.,
Holter, Ø. G., Gärtner, M., Hrženjak, M., Scambor, C., & White, A. (2014).
Men and Gender Equality. *Men and Masculinities*, 17(5), 552–577.
<https://doi.org/10.1177/1097184X14558239>

Copyright Holder :

© Eni Ria Yusriani et al (2023).

First Publication Right :

© Saree: Research in Gender Studies

This article is under:

